

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara umum dapat dikatakan bahwa implementor sudah mengimplementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dague (DBD) di Kota Padang. Hal tersebut berdasarkan temuan peneliti yang telah menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas telah menjalankan upaya-upaya pengendalian penyakit DBD, mulai dari upaya promosi kesehatan, upaya PSN-3M Plus, upaya pemantauan jentik secara berkala, upaya surveilans, upaya penyelidikan epidemiologi, upaya penanggulangan fokus, upaya pengasapan, upaya larvasidasi, serta penanganan penderita DBD.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah di paparkan dalam pembahasan bahwa proses implementasi kebijakan pengendalian penyakit DBD di Kota Padang dapat disimpulkan belum berjalan optimal, masih di temukan kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dari implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dague terkait tingkat kesulitan masalah yang ditangani yaitu sulitnya merubah perilaku masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan melalui upaya pemberantasan sarang nyamuk, hal ini didasari oleh kebiasaan masyarakat, disamping itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak merata serta tingkat pendidikan masyarakat yang membuat pola pikir masyarakat berbeda terhadap Kebijakan Pengendalian Penyakit DBD. Adanya perbedaan pandangan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang

penyakit DBD dengan masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang DBD.

Selain itu, kurangnya dana menyebabkan keterlambatan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian penyakit DBD, hal ini disebabkan karena kekurangan mesin fog yang ada di Dinas Kesehatan Kota Padang, sehingga untuk melakukan upaya fogging harus menunggu giliran. Kekurangan dana juga mengakibatkan kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dan BPJ untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan karena tidak adanya insentif yang diterima oleh masyarakat. Ketiadaan dana juga menyebabkan Kota Padang belum mampu menggratiskan biaya penanganan untuk penderita DBD. Disamping itu, besarnya kelompok sasaran kebijakan menyebabkan implementor kesulitan untuk mewujudkan tujuan dari di implementasikannya kebijakan, karena implementor belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Hal lain yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan ini yaitu minimnya dukungan dari pihak diluar implementor seperti Pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan.



Terkait tahapan yang di lakukan dalam upaya pengendalian penyakit DBD, mulai dari tahap pencegahan, tahap penanggulangan, dan tahap penanganan. Peneliti berkesimpulan untuk mencapai tujuan kebijakan ini, perlu di fokuskan pada keberhasilan pada tahap pencegahan seperti upaya promosi DBD, melakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk, karena apabila kejadian DBD bisa di cegah maka tidak perlu dilakukan upaya penanggulangan ataupun upaya penanganan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dangué (DBD) di Kota Padang, ada beberapa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yakni:

1. Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementor kebijakan pengendalian Penyakit DBD sebaiknya mengusulkan peningkatan anggaran agar pelaksanaan kebijakan dapat ditingkatkan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program seperti rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan yang lain, Pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan secara terus menerus.
3. Menggerakkan Pihak Kecamatan dan Pihak Kelurahan untuk mengembangkan inovasi dalam upaya pengendalian penyakit DBD, antara lain melalui gerakan menanam pohon pengusir nyamuk pada setiap rumah, penaburan ikan pemakan jentik, dan pemasangan perangkap jentik nyamuk.
4. Sebaiknya Walikota, Camat dan Lurah di Kota Padang masing-masing di tiap tingkatannya membentuk kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD agar dapat membantu koordinasi, pembinaan dan pemantauan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian penyakit DBD.
5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengendalian penyakit DBD di Kota Padang. Sebagai contoh, pihak swasta yang usahanya bergerak di bidang kesehatan khususnya terkait masalah DBD di undang bersama



dengan pemerintah untuk mendorong pelaksanaan kebijakan pengendalian penyakit DBD supaya lebih efektif.

6. Memperkuat promosi dan sosialisasi yang lebih intens di media cetak maupun media elektronik. Promosi dan sosialisasi dapat dilakukan lebih intens melalui peran BPJ, ketika BPJ turun langsung memeriksa jentik ke rumah masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk menambah jumlah BPJ dari dua orang untuk setiap kelurahan menjadi satu orang untuk setiap Rukun tetangga (RT). Jika diperlukan agar memberi honorium BPJ.
7. Menambah edukasi yang diberikan kepada BPJ dalam upaya mendorong implementasi kebijakan lebih efektif. Misalnya dengan cara memberikan penyuluhan langsung kepada BPJ secara intens dalam hal pemeriksaan jentik di rumah masyarakat.
8. Memberikan sanksi dan melaksanakan sanksi terhadap masyarakat yang dirumahnya ditemukan jentik. Sebagai contoh, ketika ditemukan jentik di salah satu rumah masyarakat, warga tersebut pertama ditegur secara lisan, pada pemeriksaan selanjutnya masih ditemukan jentik petugas pemeriksaa jentik memberikan teguran tertulis dan berhak menempelkan stiker yang menyatakan dirumah tersebut ada jentik. Apabila pada pemeriksaan ketiga secara berturut-turut masih ditemukan jentik, maka masyarakat harus membayar denda.
9. Lebih memfokuskan pelaksanaan pada tahap pencegahan terutama dalam upaya promosi DBD dan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk. Terkait upaya promosi DBD, implementor harus mampu meningkatkan frekuensi



sosialisasi ataupun penyuluhan pengendalian penyakit DBD yang terencana dengan baik, terintegrasi, berkualitas, dan model yang lebih variatif seperti membentuk RT/RT percontohan bebas DBD. Untuk mengatasi masalah masih kurangnya gerakan PSN maka perlu dibangun kesepakatan masyarakat untuk melakukan PSN DBD secara rutin/teratur, misalnya kegiatan Jum'at bersih.

10. Dalam hal kurangnya kesadaran masyarakat dalam membersihkan lingkungan maka masyarakat harus disadarkan agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dimulai dari keluarga sendiri (ayah, ibu, dan anak) dan memotivasi keluarga yang lain. Selain itu juga bisa dilakukan pendekatan pada masyarakat dengan mengadakan lomba kebersihan dan pemberian hadiah, jangan hanya dilakukan penyuluhan terus menerus.

